

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki beraga suku dan bangsa dengan kekayaan adat yang berbeda-beda. Jika dikaitkan dengan pendidikan, hanya pendidikan di wilayah atau daerah tertentu saja yang diperhatikan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses pendidikan yang masih terbatas, berbeda dengan masyarakat yang tinggal diperkotaan yang dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (Yuniati, 2019).

Menurut Aristoteles dalam buku (Lotulung et al., 2023), pendidikan merupakan proses pembekalan individu agar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang pantas. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga karena negara merupakan institusi sosial tertinggi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan serta dirancang secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik dari sisi jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara melalui perencanaan serta pelaksanaan yang efektif. Untuk pencapaian pendidikan yang adil dan berkualitas pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk program pendidikan wajib. Program ini dimulai dengan pendidikan wajib selama 9 tahun yang diberlakukan

sejak tahun 1994, dan saat ini telah di perluas menjadi pendidikan wajib 12 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Rahma & Kartiasih, 2024).

Minimnya fasilitas pendidikan di wilayah desa memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan di area tersebut. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Banyak wilayah di pedesaan menghadapi tantangan seperti kurangnya sarana transportasi khusus untuk sekolah, terutama bagi desa yang berlokasi jauh dari sekolah dan bagi siswa yang beda pulau dengan sekolah tersebut. Bahkan kondisi bangunannya sering kali tidak memadai. Kekurangan sarana dan prasarana ini akan berpengaruh pada proses belajar mengajar. Lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab memberikan layanan kepada berbagai pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Pihak internal mencakup semua komponen di dalam sekolah, seperti yayasan, program studi, unit kegiatan siswa, serta individu seperti siswa, guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Sementara itu, pihak eksternal terdiri dari alumni, orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Dalam dunia pendidikan, fokus utamanya adalah peserta didik, yang dalam prosesnya dianggap sebagai subjek sekaligus objek dari kegiatan belajar mengajar.

Manajemen layanan khusus adalah salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh sekolah untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas secara maksimal (Zulkarnain, 2018). Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya layanan atau fasilitas pendukung di luar

kegiatan di dalam kelas. Layanan khusus ini disediakan oleh pihak sekolah untuk mendukung kebutuhan peserta didik. Keberadaan layanan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pembelajaran siswa dapat berlangsung secara optimal (Sembiring et al., 2023). Layanan khusus bagian penting dalam memenuhi kebutuhan siswa dan anggota sekolah. Layanan ini juga dirancang untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Setyowati, 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh akses pendidikan yang layak, aman, berkesinambungan, dan sesuai standar mutu nasional. Salah satu wujud pemenuhan mandat tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas transportasi sekolah khususnya di wilayah dengan tantangan geografis. Layanan transportasi sekolah, sebagaimana diungkapkan Kusmintardjo (1993), bertujuan membawa siswa ke dan dari sekolah agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana, jumlah armada yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat, distribusi layanan yang belum merata, serta tingginya biaya transportasi bagi siswa yang tidak memiliki akses layanan tersebut. Sebagai wujud dari amanat tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyediaan

transportasi laut bagi siswa antarpulau untuk mempermudah akses mereka menuju sekolah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi mengatasi hambatan geografis di wilayah kepulauan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Melalui layanan transportasi yang aman, teratur, dan terjangkau, pemerintah berupaya mendorong pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil.

Akses transportasi yang baik adalah elemen krusial untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan (Mustika et al., 2024). Namun, di beberapa daerah di pulau, masih ada kekurangan dalam penyediaan fasilitas transportasi yang aman dan terjangkau untuk para pelajar masalah ini dapat mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran, keterlambatan dan mempengaruhi penilaian akhir mengenai disiplin siswa (Irshadi & Ivanna, 2024). Oleh karena itu, pengelola transportasi sekolah perlu dijadikan fokus utama di antara berbagai aspek pendidikan lainnya. Namun di beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Barat, masih ditemukan kekurangan dalam penyediaan transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa. Kesulitan ini dapat mengakibatkan tingginya tingkat ketidakhadiran, akibat keterlambatan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menyediakan layanan transportasi kapal laut gratis atau bersubsidi. Kapal-kapal ini dapat beroperasi pada jalur yang menghubungkan daerah pemukiman penduduk dengan sekolah. Selain memudahkan akses transportasi, kapal bersubsidi ini juga bisa mengurangi biaya transportasi siswa yang kurang mampu.

Kecamatan Jemaja Barat memiliki beberapa sekolah dasar (SD) yang berada di berbagai desa, seperti SD Negeri 001 Keramut, SD Negeri 002 Impol, dan SD Negeri 003 Sunggak. Namun untuk jenjang pendidikan menengah pertama, hanya terdapat satu sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Sunggak. Kondisi ini menyebabkan siswa yang tinggal beda pulau dari sekolah mengalami kesulitan transportasi yang aman dan lebih terjangkau untuk berangkat ke sekolah. Oleh karena itu, fokus pembahasan ini akan lebih diarahkan pada SMP Negeri 1 Sunggak, dikarenakan SMP tersebut berada di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat yang mengharuskan siswa dari desa lain harus menyebrang untuk sampai di Sekolah.

Kenyataan yang ada di lapangan yaitu di Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di SMP 1 Sunggak, pemerintah kabupaten belum menyediakan transportasi kapal penyebrangan khusus untuk berangkat ke sekolah untuk anak SMP, Anak SMP Negeri 1 Sunggak Kecamatan Jemaja Barat masih menggunakan transportasi penyebrangan pribadi milik warga yang ada di Kecamatan Jemaja Barat untuk berangkat ke sekolah.

Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Jemaja Barat



Sumber : Mapcarta <https://www.bing.com/peta+kecamatan+jemaja+barat>, 2025

Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari tiga desa dan memiliki satu sekolah menengah atas yaitu SMP Negeri 1 Sunggak dan dari setiap desa memiliki transportasi penyebrangan pribadi milik warga setempat, untuk berangkat ke sekolah setiap siswa/siswi sekali berangkat dan pulang harus membayar ongkos sebesar Rp. 15. 000/25.000. Alasan anak sekolah berangkat menggunakan transportasi penyebrangan pribadi milik warga adalah karena tidak adanya transportasi yang disediakan khusus untuk siswa untuk berangkat ke sekolah. Jarak tempuh untuk menuju kesekolah dari Desa Impol ke Sunggak sekitar 1,89 mil laut dengan waktu tempuh 15-25 Menit tergantung kecepatan pompong, kondisi ombak, arus dan cuaca dan untuk jarak tempuh dari Desa Keramat ke Sunggak sekitar 3,02 mil laut dengan waktu tempuh 25-35 menit tergantung kecepatan pompong, kondisi cuaca, arus dan ombak.

Gambar 1. 2 Kondisi Kendaraan Anak SMP di Kecamatan Jemaja Barat



Sumber : detik.com <https://www.detik.com/edu/foto/d-6243269/kisah-anak-anak-di-anambas-seberangi-lautan-untuk-tetap-sekolah>, 2025

Keberadaan layanan transportasi sekolah memberikan manfaat, salah satunya adalah mengurangi beban orang tua bagi keluarga yang kurang mampu, layanan ini juga memberikan dampak positif bagi sekolah, seperti meningkatkan persepsi sekolah dimata para wali murid dan meningkatkan daya saing sekolah dalam menyediakan fasilitas yang membantu siswa.

Tabel 1. 1 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jemaja Barat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah siswa	Jumlah penduduk usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)
1	Sekolah Dasar (SD)	92	101	91%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	40	54	74%

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel tersebut menggambarkan tingkat pendidikan, jumlah siswa, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada jenjang SD tercatat sebanyak 92 siswa dengan APK sebesar 91%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah berpartisipasi dalam pendidikan. Sementara itu, pada jenjang SMP jumlah siswa

hanya mencapai 40 orang dengan APK sebesar 74%. Hal ini menandakan adanya penurunan yang cukup signifikan dalam partisipasi pendidikan ketika siswa beralih dari jenjang SD ke SMP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan di tingkat dasar tergolong baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memfokuskan perhatian pada persoalan mengenai “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Transportasi Laut bagi Siswa Antar Pulau di Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas”. Pemerintah belum menyediakan modal Transportasi khusus bagi siswa, meskipun kebutuhan tersebut sangat penting mengingat kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang saling terpisah oleh perairan. Ketiadaan fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah menyebabkan para siswa masih bergantung pada transportasi yang dioperasikan oleh masyarakat setempat. Transportasi yang tersedia pun masih bersifat berbayar, sehingga menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana pendukung pendidikan, khususnya transportasi laut siswa antar pulau masih belum optimal, sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk memenuhi hak setiap warga negara, terutama siswa, agar dapat mengakses pendidikan secara layak dan tidak terhambat oleh faktor geografis maupun ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah yaitu “Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Transportasi laut Bagi Siswa SMP antar pulau di Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, tujuannya ialah untuk menganalisis bagaimana Tanggung Jawab pemerintah dalam penyediaan transportasi laut Bagi Siswa SMP antar pulau di Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu mengembangkan teori tanggung jawab dengan memberikan wawasan tentang bagaimana model pengadaan transportasi khusus sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pada ilmu pengetahuan untuk perkembangan ilmu di bidang ilmu pemerintahan dan diharapkan juga penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya yang tertarik meneliti topik yang sama.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kecamatan Jemaja Barat dan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, merancang dan menerapkan sistem transportasi khusus sekolah yang berkelanjutan.
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini juga dapat memberi tahu pihak swasta dan masyarakat betapa pentingnya mereka terlibat secara aktif dalam penyediaan layanan publik yang baik. Secara lebih luas, penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa untuk mengadopsi model yang sama.

